



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN  
STATISTIK PROVINSI RIAU**

**RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)  
TAHUN 2014-2019**

**PEKANBARU – 2018**

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-7
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-9
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-10
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DISKOMINFOTIK PROVINSI RIAU.....	II-1
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	II-1
2.2 Sumber Daya Diskominfo Provinsi Riau.....	II-8
2.3 Kinerja Diskominfo Provinsi Riau.....	II-18
2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Diskominfo Provinsi Riau.....	II-18
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DISKOMINFOTIK PROVINSI RIAU....	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau.....	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.....	III-4
3.3 Telaahaan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kabupaten/Kota.....	III-7
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Startegi.....	III-10
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	III-11
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATANSERTA PENDANAAN.....	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PENUNJANG URUSAN BIDANG KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.....	VII-1
BAB VIII PENUTUP.....	VIII-1

# KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh .....

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Provinsi Riau sebagai organisasi perangkat daerah yang sudah terbentuk sesuai Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo Provinsi Riau Tahun 2014-2019 ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang memuat tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dalam menunggang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Renstra ini mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian dari rancangan awal yang telah disusun, hal-hal yang menyebabkan perubahan tersebut adalah adanya hasil Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019 dan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai pengganti Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

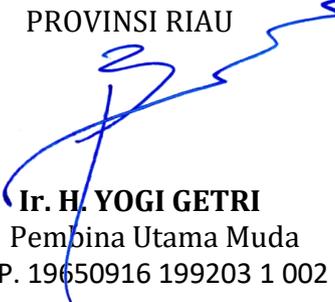
Selanjutnya dengan telah disahkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019, maka Renstra Diskominfo Provinsi Riau ini juga disinkronkan dengan Perubahan RPJMD dimaksud.

Renstra Diskominfo Provinsi Riau Tahun 2014-2019 juga disusun untuk dapat digunakan sebagai arahan pokok dan acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan pada Diskominfo Provinsi Riau. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya untuk kelancaran dan keberhasilan Diskominfo Provinsi Riau untuk mewujudkan visi dan misinya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh .....

Pekanbaru, Februari 2018

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
PROVINSI RIAU



**Ir. H. YOGI GETRI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650916 199203 1 002

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis (Renstra) OPD merupakan suatu dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Fungsi Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah :

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan yang realistis, konsisten dengan visi, misi dan tupoksi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dalam kerangka waktu sesuai kapasitas OPD dalam implementasinya
2. Menerjemahkan arah dan kebijakan pemerintah daerah terkait perkembangan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat
3. Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau
4. Merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan
5. Membantu dalam melakukan evaluasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau

Dalam menyusun Rencana Strategis, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau melalui proses yang terdiri dari :

1. Pengolahan Data dan Informasi
2. Penyusunan profil pelayanan OPD
3. Identifikasi kondisi umum, analisis potensi dan permasalahan OPD
4. Merumuskan isu-isu strategis
5. Merumuskan visi dan misi
6. Merumuskan tujuan dan sasaran
7. Merumuskan strategi dan kebijakan OPD
8. Menetapkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau, memuat 4 komponen penting yaitu :

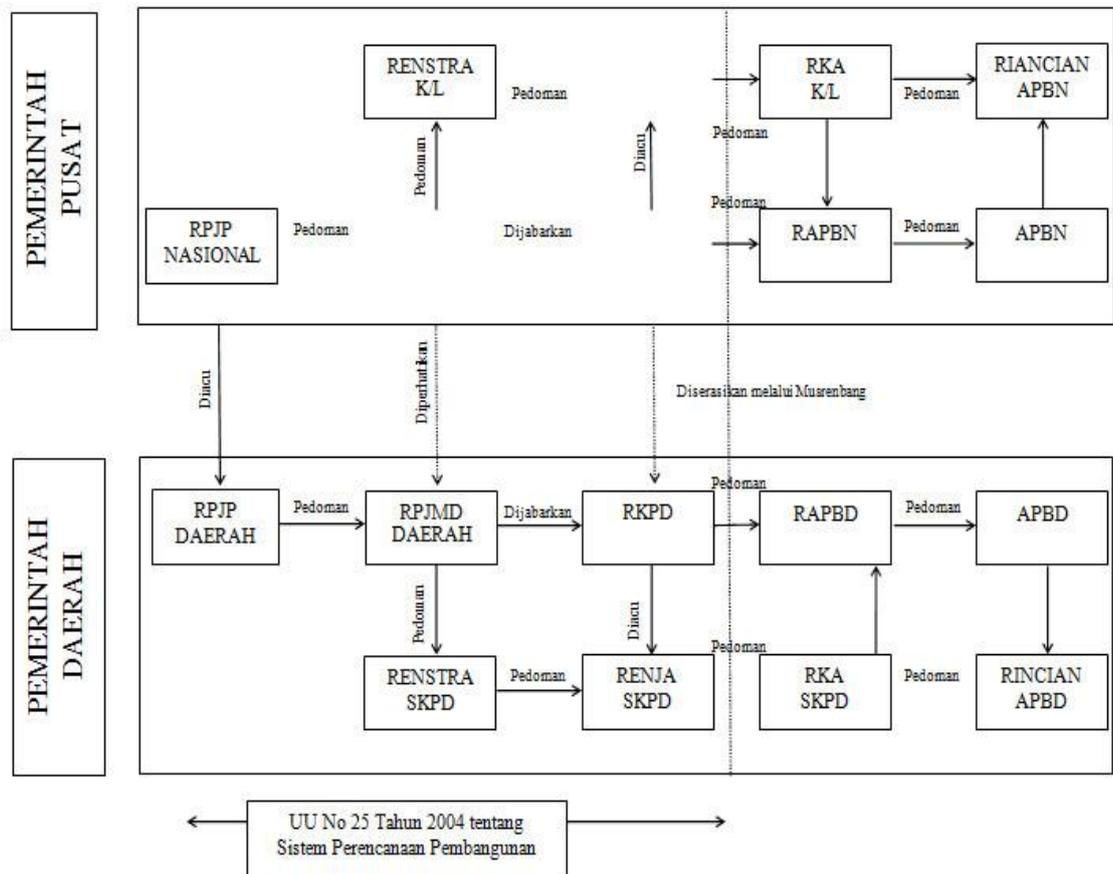
1. Memuat secara jelas arah masa depan yang dituju melalui Visi dan Misi Dinas.
2. Menggambarkan kondisi saat ini dan mengidentifikasi kondisi ke depan untuk menetapkan Misi Organisasi.
3. Menetapkan Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan direncanakan 5 tahun ke depan.
4. Memuat ukuran keberhasilan berupa Indikator kinerja dan target kinerja sebagai umpan balik untuk pertimbangan kegiatan selanjutnya dalam rangka menjamin tercapainya sasaran dan tujuannya.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau merupakan sub sistem dari sistem pembangunan jangka menengah daerah, sehingga untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan Komunikasi, Informatika dan Statistik di Provinsi Riau, penyusunan Revisi Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau berpedoman pada Perubahan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 29 Januari 2018, tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019, Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Tahun 2015 – 2019 serta Renstra Kabupaten/Kota.

Penyusunan Revisi Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau 2014 – 2019 dilakukan dengan memperhatikan kondisi eksisting serta mengakomodir perubahan internal dan eksternal yang terjadi, baik di Provinsi Riau maupun Nasional.

Gambaran hubungan Renstra OPD, RPJMD Provinsi, Renstra Kementerian dan Renja SKPD disajikan dalam gambar berikut ini :



Pesatnya kemajuan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) telah mendorong perluasan jaringan akses informasi dan komunikasi dalam lingkup global, sehingga komunikasi dan lalu lintas informasi menjadi seolah-olah tanpa batas kewilayahan, tanpa batas negara, tanpa batas jarak dan waktu.

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang demikian pesat tersebut telah mendorong peran strategis informasi sebagai suatu modal dasar pembangunan. Berbagai potensi keunggulan lokal seperti keindahan alam, iklim, sumber daya hayati baik perkebunan, perikanan dan kehutanan, sumber daya mineral dan pertambangan serta keragaman budaya dan bahasa jika dikemas sebagai produk informasi yang tepat akan menjadi sumber kegiatan ekonomi yang tiada batasnya dan berdaya saing tinggi. Keunggulan khas tersebut dapat menjadi *information database* yang dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin.

Proses komunikasi dan penyebaran informasi yang dipercepat menjadi ciri masyarakat baru ini menyebabkan keberadaan teknologi komunikasi dan informasi menjadi bersifat mutlak. Perkembangan dan kemajuan tersebut secara mendasar telah mengubah dan mentransformasikan pola hidup dan cara dalam melakukan berbagai kegiatan, termasuk di bidang pemerintahan.

Penggunaan Teknologi Informasi di lingkungan Pemerintah, baik di Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota telah mengalami kemajuan sangat pesat. Pada tataran birokrasi, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi trend baru, diawali dengan munculnya isu "*elektronik government (e-Gov)*" yaitu pemerintahan yang berbasis elektronik.

Saat ini, kemampuan daerah dalam mengembangkan, memanfaatkan dan menerapkan pengetahuan termasuk teknologi akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Oleh karenanya, pengembangan inovasi daerah yang sistematis menjadi sangat penting dan penentu keberhasilan menuju era *ekonomi (knowledge economy)* dan masyarakat yang berpengetahuan (*knowledge society*).

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 4 November 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau merupakan suatu unit kerja yang dipercaya menyelenggarakan urusan pemerintahan serta pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang persandian dan bidang Statistik di Provinsi Riau dengan berupaya untuk selalu meningkatkan pelayanan di Komunikasi, Informatika, persandian dan Statistik sehingga dapat menjadi pusat informasi bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan peraturan dan perundang-undangan dalam Revisi Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);
12. Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025;
13. Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019;
14. Peraturan Gubernur Riau Nomor 23 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;

## **1.3 Maksud dan Tujuan**

### **1.3.1. Maksud**

Maksud penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau adalah untuk menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau, Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019;

### **1.3.2. Tujuan :**

1. Agar terdapat keselarasan dalam dokumen perencanaan.
2. Memberikan arah pembangunan jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau periode tahun 2014 – 2019;
3. Menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam merencanakan Program Prioritas dan kegiatan-kegiatan setiap tahunnya;
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Diskominfo dan Statistik Provinsi Riau yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

## **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Perangkat
- 2.3. Kinerja Pelayanan OPD

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat daerah.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

3.3. Telaahan renstra K/L dan Renstra.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Startegis

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat)

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau

4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN)

BAB. VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB. VIII. PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

#### **DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**

##### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau**

###### **A. Tugas Pokok Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau**

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau yang pembentukannya mengalami tahapan perubahan nomenklatur sebagai berikut :

1. Tahun 1997 telah dibentuk Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Riau.
2. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, pada Tahun 2001 telah dibentuk:
  - a. Badan Pengolahan Data Elektronik (BPDE) Provinsi Riau yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengolahan Data Elektronik.
  - b. Badan Informasi, Komunikasi dan Kesatuan Bangsa Provinsi Riau melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi, Komunikasi dan Kesatuan Bangsa.

3. Pada Tahun 2008, kedua lembaga tersebut di atas (BPDE dan Badan Infokom Kesbang) mengalami peleburan, menjadi Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau.
4. Tahun 2014, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau, Diskominfo dan PDE Provinsi Riau berubah menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau, sedangkan untuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Riau No. 10 Tahun 2014 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
5. Tahun 2016, dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibentuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau sebagai Organisasi Perangkat Daerah Baru sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur e-Government, Bidang Layanan e-Government, Bidang Statistik, Bidang Persandian.

Susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
- d. Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur e-Government
- e. Bidang Layanan e-Government
- f. Bidang Statistik
- g. Bidang Persandian

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur e-Government, Bidang Layanan e-Government, Bidang Statistik, Bidang Persandian;
- b. pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur e-Government, Bidang Layanan e-Government, Bidang Statistik, Bidang Persandian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur e-Government, Bidang Layanan e-Government, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian;
- d. pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur e-Government, Bidang Layanan e-Government, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian;

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **B. Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau**

### **1. KEPALA DINAS**

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dipimpin oleh Kepala Dinas. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada bidang komunikasi Informatika, persandian dan statistik.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

### **2. SEKRETARIAT**

Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dipimpin oleh Sekretaris.

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan Perencanaan Program, Keuangan dan Perlengkapan, Kepegawaian dan Umum meliputi ketatausahaan, organisasi ketatalaksanaan, kehumasan, hukum, evaluasi dan pelaporan, serta koordinasi pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;

- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada Kepala Dinas;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Perencanaan Program.
- b. Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

### **3. BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Komunikasi Informasi, Seksi Diseminasi Informasi, Seksi Multimedia dan Dokumentasi.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada Kepala Dinas;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari:

- a. Seksi Komunikasi Informasi

- b. Seksi Diseminasi Informasi
- c. Seksi Multimedia dan Dokumentasi

#### 4. BIDANG PENGELOLAAN DAN INFRASTRUKTUR E-GOVERNMENT

Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur e-Government mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi Seksi Infrastruktur dan Teknologi, Seksi Pengelolaan Data dan Interoperabilitas, dan Seksi Internet dan Intranet

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur e-Government;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur e-Government;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada Kepala Dinas;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur e-Government terdiri atas:

- a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi
- b. Seksi Pengelolaan Data dan Interoperabilitas
- c. Seksi Internet dan Intranet

#### 5. BIDANG LAYANAN E-GOVERNMENT

Kepala Bidang Layanan e-Government mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Pengembangan Aplikasi Pemerintah, Seksi Pengembangan Aplikasi Publik, dan Seksi Tata Kelola e-Government.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Layanan e-Government;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Layanan e-Government;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada Kepala Dinas;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Data dan Pemberdayaan Sistem Informasi terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Aplikasi Pemerintah
- b. Seksi Pengembangan Aplikasi Publik
- c. Seksi Tata Kelola e-Government

## **6. BIDANG STATISTIK**

Kepala Bidang Statistik mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Pendataan, Seksi Pengolahan dan Analisis Data, Seksi Penyajian Data dan Informasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Statistik;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Statistik;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada Kepala Dinas;

- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Statistik terdiri dari :

- a. Seksi Pendataan;
- b. Seksi Pengolahan dan Analisis Data;
- c. Seksi Penyajian Data dan Informasi .

## **7. BIDANG PERSANDIAN**

Kepala Bidang Persandian mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Tata Kelola Persandian, Seksi Operasional Pengamanan Persandian, Seksi Pengawasan dan Evaluasi Persandian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Persandian;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Persandian;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada Kepala Dinas;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Persandian terdiri dari :

- a. Seksi Tata Kelola Persandian,
- b. Seksi Operasional Pengamanan Persandian,
- c. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Persandian.

**C. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau**

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Riau. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau terdiri dari 1 orang Kepala Dinas (Eselon II), 1 orang Sekretaris Dinas (Eselon III), 5 Orang Kepala Bidang (Eselon III), 2 Orang Kepala UPT (Eselon III) dan 23 Orang Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi (Eselon IV). Selengkapnya disajikan pada halaman berikut.

## 2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik perlu didukung oleh Sumber daya, baik itu sumber daya manusia, sarana dan prasarana (asset) dan sarana pendukung lainnya.

### a. Sumber Daya Manusia

#### i). Jumlah Pegawai

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2017 adalah sebanyak 77 orang PNS, 2 orang PTT dan 80 Orang THL

### 1. Kualifikasi Pendidikan

Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pegawai (PNS) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1** : Jumlah Pegawai (PNS) Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Riau berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2017

No	Tingkat Pendidikan	Tahun 2017
1	Sekolah Dasar (SD)	0
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	0
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	15
4	Diploma (D3)	6
5	Sarjana (S1)	36
6	Pasca Sarjana (S2)	20
7	Pasca Sarjana (S3)	0
	<b>Jumlah Total</b>	<b>77</b>

**Tabel 2.2** : Jumlah Pegawai (PNS) Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Riau Menurut Tingkat Pendidikan dan Golongan Tahun 2017

No	Pendidikan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	PascaSarjana (S2)	0	0	5	15	20
2	Sarjana (S1)	0	0	35	1	36
3	D3	0	3	3	0	6
4	SMA	0	7	8	0	15
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>10</b>	<b>51</b>	<b>16</b>	<b>77</b>

## 2. Pangkat dan Golongan.

Berdasarkan Pangkat dan Golongan Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3** : Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Riau berdasarkan Pangkat /Golongan Tahun 2017

No	Pangkat / Golongan	Tahun 2017
1.	Pembina Utama Madya / IV d	0
2.	Pembina Utama Muda / IV c	1
3.	Pembina Tingkat I / IV b	4
4.	Pembina / IV a	11
5.	Penata Tingkat I / III d	22

No	Pangkat / Golongan	Tahun 2016
6.	Penata / III c	7
7.	Penata Muda Tingkat I / III b	14
8.	Penata Muda / III a	8
9.	Pengatur Tingkat I / II d	3
10.	Pengatur / II c	5
11.	Pengatur Muda Tingkat I / II b	2
12.	Pengatur Muda / II a	0
	<b>Jumlah PNS</b>	<b>77</b>

### 3. Pejabat Struktural

Berdasarkan Eselon Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik Provinsi Riau Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4** : Jumlah Pegawai Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Riau berdasarkan eselon Tahun 2017

Eselon				JUMLAH
I	II	III	IV	
-	1	6	18	25

### 4. Fungsional.

Berdasarkan jenis jabatan fungsional, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau memiliki 2 orang pejabat Fungsional.

## 5. Jenis Kelamin.

Berdasarkan Jenis Kelamin Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.5.** : Jumlah Pegawai Dinas Kominfo Provinsi Riau berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017

No	Jenis Kelamin	Tahun 2016
1	Laki-laki	38
2	Perempuan	39
	<b>Jumlah</b>	<b>77</b>

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Kinerja Pelayanan Dinas Komunikas, Informatika dan Statistik Provinsi Riau selama tahun 2014 – 2019 sebagai berikut :

- a. Pengembangan Teknologi Informasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau

Dalam era globalisasi, peran teknologi informasi saat ini sangat dominan, melalui teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan akurat yang akhirnya akan meningkatkan produktivitas. Komponen teknologi informasi terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak komputer, sistem jaringan baik berupa LAN ataupun WAN, sistem telekomunikasi yang akan digunakan untuk mentransfer data serta sumber daya manusia yang berbasis teknologi informasi. Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau selama kurun waktu lima tahun telah membangun jaringan komunikasi antar OPD Pemprov Riau serta pelatihan SDM, dengan data sebagai berikut :

Tabel 2.6. Pembangunan Teknologi Informasi di Provinsi Riau

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	JARINGAN WIRELESS	0	7 SKPD	12 SKPD	20 SKPD	21 SKPD
2	JARINGAN FO	10 SKPD	0	0	11	11
3	JUMLAH APLIKASI YANG DIBANGUN	1 aplikasi	0	3 Aplikasi	5 Aplikasi	3 Aplikasi
4	JUMLAH APARATUR YANG MENGIKUTI PELATIHAN TIK	340 orang	545 orang	862 orang	90 ORANG	-

Untuk konektivitas jaringan di OPD Pemerintah Provinsi Riau, telah dibangun melalui jaringan wireless dan jaringan Fiber Optic yang dibangun sejak tahun 2010.

b. Penyebarluasan Informasi

Salah satu permasalahan dalam bidang komunikasi dan informatika yaitu masih adanya masyarakat yang kesulitan dalam mengakses informasi khususnya masyarakat pedesaan. Hal ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan informasi antara masyarakat di pedesaan dengan masyarakat perkotaan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau telah melakukan berbagai aktifitas dalam upaya penyebarluasan informasi melalui Televisi dan Radio.

Tabel 2.7. Jumlah Publikasi melalui media Informasi

No.	MEDIA INFORMASI	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	TVRI	2 kali	7 kali	3 kali	-	-
2	RTV	6 kali	8 kali	8 kali	13 kali	17 kali
3	RRI	0	0	5 kali	0	0

Tabel 2.8. Jumlah Media Informasi di Provinsi Riau

NO.	MEDIA	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	TELEVISI	27	36	75	75	75
2	RADIO	99	117	171	171	171
3	SURAT KABAR	31	31	31	31	31

Selain penyebarluasan informasi melalui media elektronik, media lain yang digunakan untuk menyebarkan data dan informasi Pembangunan Provinsi Riau serta berita Pemerintah Provinsi Riau yaitu melalui media online (website). Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau saat ini mengelola website resmi Pemerintah Provinsi Riau (<http://www.riau.go.id>), website <http://diskominfo.riau.go.id> dan website <http://mediacenter.riau.go.id>.

Tabel 2.9. Jumlah Pengunjung Website yang dikelola Diskominfo dan Statistik Provinsi Riau

No.	WEBSITE	2011	2012	2013	2014	2015
1	<a href="http://www.riau.go.id">http://www.riau.go.id</a>	35.797	61,233	64.807	33.827	169.877
2	<a href="http://.diskominfo.riau.go.id">http://.diskominfo.riau.go.id</a>	2.112	2.178	2.316	5.088	14.852
3.	<a href="http://.Media center.riau.go.id">http://. Media center.riau.go.id</a>	0	19.908	105.922	196.782	244.542

b. Penyediaan Data dan Informasi

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau sebagai OPD penanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi, senantiasa melakukan updating data pembangunan Provinsi Riau yang meliputi 8 (delapan) kelompok data penting pembangunan di Provinsi Riau yang terdiri dari data umum, data ekonomi dan Keuangan, Data Infrastruktur, Data Politik, Hukum & Keamanan, Data Industri, Perdagangan, Lembaga

Keuangan dan Koperasi, Data Sumber Daya Alam, Data Sosial Budaya dan Data Insidensial.

Data-data tersebut selain untuk keperluan internal Pemerintah Provinsi Riau juga mendukung ketersediaan Data Pembangunan Provinsi Riau beserta seluruh Kabupaten / Kota se Provinsi Riau pada server Sistem Database Dukungan kebijakan Nasional (SDDKN) Deputi Mensesneg Bidang Dukungan Kebijakan Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Tabel 2.10. Jumlah Data Pembangunan Provinsi Riau yang disajikan di SDDKD/SDDKN

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah item data	19.235	30.207	40.743	44.350	45.896

c. Penyediaan Layanan Internet Gratis

Dalam upaya mencerdaskan masyarakat dan menyediakan akses informasi kepada masyarakat, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau telah menyediakan layanan internet gratis bagi masyarakat berupa penyediaan :

- Media Center di Perpustakaan Soeman HS (Penyediaan internet gratis),
- Media Center di Lantai I Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau (selain penyediaan internet gratis, sejak tahun 2013 juga dimanfaatkan untuk pembelajaran TIK bagi guru dan siswa)

Tabel 2.11. Jumlah Pengunjung Layanan Internet Gratis yang dikelola Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau

No.	LOKASI	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	MEDIA CENTER DI LT 1 DISKOMINFO & PERPUSTAKAAN SOEMAN HS	17.914	15.742	17.174	16.591	14.859

d. Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informasi

Ketersediaan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informasi di Provinsi Riau baik dari segi kuantitas maupun kualitas masih belum sesuai dengan kebutuhan. Dengan memberikan pembinaan dan pelatihan kepada aparatur dan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan aparatur dalam mengelola informasi.

Tabel 2.12. Jumlah Peserta Pelatihan bidang komunikasi dan informasi

NO.	Jenis Pembinaan/ Pelatihan	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pembinaan lembaga penyiaran	60 orang	70 orang	50 orang		
2	Wokshop jurnalistik media siaran	100 orang	50 orang	50 orang	155 orang	
3	Forum Komunikasi Media Komunikasi	100 orang	0	120 orang		
4	Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi	40 orang	0	50 orang	75 orang	75 orang
5	Pelatihan Teknis Kelompok Media Pertunjukan Rakyat	25 orang	0	52 orang		
6	Sosialisasi / Bimtek Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Publik	110 orang	0	65 orang		
7	Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat	0	0	0	100 orang	100 orang

**Tabel 2.13. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU (2014 - 2016)**

NO	INDIKATOR	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE -				
		NSPK	IKK	INDIKATOR LAINNYA											(%)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Nilai e-government Pemerintah Provinsi Riau				2,3	2,45	2,6	2,65	2,75	2,2	0	0			96	0	0		
1.a	Jumlah Jaringan Komunikasi dan informatika yang terpasang				0 Titik	51 Titik	51 Titik	51 Titik	51 Titik	43 Titik	51 Titik	51 Titik			100	100	100		
1. b	Jumlah OPD yang menerapkan e-government secara terintegrasi, aman dan handal				6 SKPD	30 SKPD	35 SKPD	42 SKPD	51 SKPD	8 SKPD	11 SKPD	43 SKPD			133	36,7	122,8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.	Nilai Keterbukaan Informasi				35,82	39,36	42,91	44,5	46,45	17,4	30,569	34,13			48,58	77,67	79,54		
	Provinsi Riau																		
2.a	Presentase keterisian data pembangunan Provinsi Riau				0	0	26,19 %	26,98%	27,66%	0	0	27,77%			0	0	106		
2.b	Jumlah pengunjung website resmi dan media online yang dikelola Diskominfo Provinsi Riau				230.000 Orang	260.000 Orang	280.000 Orang	300.000 Orang	320.000 orang	235.397 Orang	429.271 Orang	575,372 Orang			102,3	165	205		
2.c	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan internet yang dikelola Diskominfo Provinsi Riau				0	0	35.000 Orang			0	0	13.317 Orang			0	0	38 %		

**Keterangan :**

Indikator Nilai e-government Provinsi Riau adalah nilai yang diperoleh berdasarkan pemeringkatan e-government yang dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo RI sebagai bentuk penghargaan yang diberikan kepada Lembaga Pemerintah yang telah memanfaatkan TIK secara terintegrasi dalam memberikan layanan publik. Kategori yang dinilai adalah aspek kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan.

Indikator Nilai Keterbukaan Informasi adalah Nilai yang diperoleh berdasarkan pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik terhadap ketaatan implementasi seluruh kewajiban Badan Publik dalam memberikan akses informasi publik kepada masyarakat seperti yang diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penilaian ini dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) dengan aspek yang dinilai kelengkapan regulasi tentang Keterbukaan Informasi Publik, kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan informasi dan kelengkapan proses pelayanan informasi publik.

2.4. **Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.**

Tabel 2.15. Komparasi Capaian Sasaran Dinas Kominfotik Provinsi Riau terhadap Sasaran Renstra OPD Kabupaten/Kota Dan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

No.	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra SKPD Kabupaten /Kota	Sasaran pada Renstra Kementerian Kominfo RI	Keterangan
1	Nilai e-government Provinsi Riau				Nilai e-gov Kab/Kota merupakan nilai rata-rata dari Kab/Kota se Provinsi Riau
2	Nilai Keterbukaan Informasi Provinsi Riau				

Tabel 2.16. Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi Riau

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Kominfo	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Kominfo
	-	-	-	-	-

Tabel 2.17. Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Provinsi Riau

No.	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Kominfo	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Kominfo
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Tabel 2.18. Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Provinsi Riau

No.	Aspek kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap pelayanan SKPD	Catatan bagi perumusan program dan kegiatan SKPD
1	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	-	-	-
2	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	-	-	-
3	Kinerja layanan/jasa ekosistem	-	-	-
4	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	-	-	-
5	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	-	-	-

### 2.7.1. TANTANGAN

1. Persaingan Global
2. Belum optimalnya penyelenggaraan e-government
3. Adanya kesenjangan digital (tidak meratanya) sarana komunikasi dan informatika di daerah pedesaan dan perbatasan

4. Kurangnya komitmen Pimpinan OPD Provinsi Riau dan OPD Kabupaten/Kota terhadap integrasi data, pertukaran data dan keterisian data
5. Content digital yang kurang mendidik, sesat dan atau merusak moral dan tatanan sosial masyarakat
6. Rendahnya pengetahuan masyarakat akan hak dan kewajiban tentang penyiaran dan keterbukaan informasi
7. Tingginya sengketa informasi yang terjadi
8. Ketidaksiapan badan publik dalam menghadapi permintaan informasi
9. Terjadinya perubahan regulasi tentang perangkat lunak dan perangkat keras terhadap platform produk TI
10. Keterbatasan anggaran
11. Masih Rendahnya Ketersediaan Sumber Daya Manusia Yang Handal Dan Profesional Khususnya Yang Menguasai Bidang It (Analisis, Aplikasi, Database, Pemograman Dan Jaringan)
12. Inkonsistensi Penempatan Aparatur dengan Kompetensi Yang Dimiliki

#### **2.7.2. Peluang**

1. Kemajuan teknologi informasi
2. OPD yang menangani komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota sebagian besar sudah mempunyai nomenklatur yang sama
3. Keinginan masyarakat memperoleh informasi
4. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat (khususnya Kemendagri, Kemkominfo dan Kemsesneg RI)
5. Adanya partisipasi dan kemitraan komunikasi sosial antar Provinsi, Kabupaten/Kota, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan masyarakat (komunikasi)
6. Tingginya harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi
7. Media massa yang sangat berkembang baik milik pemerintah maupun swasta

8. Peran strategis Komisi Informasi dalam mengawal reformasi birokrasi agar pelayanan publik menjadi lebih baik
9. Edukasi Internet sehat dan aman yang cerdas, kreatif dan produktif
10. Akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan Negara

# **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU**

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Diskominfo Provinsi Riau**

#### **A. Analisis Lingkungan Strategis**

Analisis lingkungan baik internal maupun eksternal merupakan hal penting dalam menetapkan faktor-faktor penentu keberhasilan (critical success factors) suatu organisasi. Dengan mengetahui kondisi internal dan eksternal akan tergambar kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mempengaruhi organisasi. Analisis ini diperlukan untuk meningkatkan kapabilitas organisasi dalam merespon setiap perkembangan dan dinamika lingkungan. Metode yang diterapkan dalam melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal yaitu dengan menerapkan Analisis SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities dan Threats). Implementasi metode ini akan membantu organisasi untuk memperkuat keunggulannya dengan menangkap peluang yang ada atau menekan kelemahannya melalui penyelesaian terhadap tantangan yang dihadapi. Hal yang paling buruk akan terjadi, apabila organisasi mengembangkan kelemahannya karena ketidakmampuannya untuk mengantisipasi dan mengatasi ancaman yang terjadi. Identifikasi yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

#### **1. Kekuatan :**

- a) Adanya Komitmen Pimpinan yang tinggi;
- b) Tersedianya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Riau.
- c) Adanya Regulasi Pendukung bidang komunikasi dan informatika

- d) Tersedianya Sarana dan Prasarana : Server Data, VSAT dan modem GPRS, Infrastruktur jaringan Pemerintah Provinsi Riau (Jaringan Fiber Optik / kabel bawah tanah, Jaringan wireless, dan Jaringan PNS Box), layanan internet 500 Mbps, akses komunikasi telpon bebas biaya (IP-Phone)., Peralatan dan ruangan Multimedia, Media Center, Newsroom Pemerintah Provinsi Riau, mobil unit untuk diseminasi informasi, Digital signage (anjungan informasi)
- e) Adanya Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri di luar pemerintah yang berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik
- f) Tersedianya aparatur pengelola multimedia, TIK, analis data, jurnalistik dan PPNS bidang Komunikasi dan Informatika
- g) Tersedianya Sumber Data yang otentik dan valid pada OPD Provinsi dan OPD Kab/Kota;
- h) Tersedianya website [www.riau.go.id](http://www.riau.go.id) (portal),  
<http://mediacenter.riau.go.id>, <http://diskominfo.riau.go.id>, dan  
<http://.komisiinformasi.riau.go.id>
- i) Tersedianya aplikasi e-Mail Pemerintah Provinsi Riau, aplikasi perkantoran (e-office), aplikasi [drive.riau.go.id](http://drive.riau.go.id) (aplikasi penyimpanan data-data), SDDKD/SDDKN (Sistem Database Dukungan Kebijakan Daerah/Nasional). aplikasi LAPOR.GO.ID
- j) Tersedianya command center.
- k) Adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kominfo Provinsi Riau;
- l) Adanya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai media komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam penyebarluasan informasi publik

## **2. Kelemahan**

- a) Kurang optimalnya layanan informasi publik (personal, sarana dan konten)
- b) Belum optimalnya penguatan dan pelayanan PPID Badan Publik.

- c) Kurang maksimalnya keamanan jaringan (network security), pemanfaatan aplikasi yang telah dibangun, Akses jaringan internet hingga ke perdesaan dan ketersediaan Standar Teknis Penerapan Aplikasi di setiap OPD;
- d) Kurang maksimalnya ketersediaan data umum, data pembangunan dan data spasial.
- e) Rendahnya pengetahuan publik tentang Keberadaan Komisi Informasi
- f) Kurangnya jumlah aparatur bidang komunikasi dan informatika

### **3. Peluang**

- a) Kemajuan teknologi informasi;
- b) Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat (khususnya Kementerian Dalam Negeri RI, Kemkominfo RI dan Kemensesneg RI)
- c) Adanya partisipasi dan Kemitraan Komunikasi Sosial antar Provinsi, Kab/Kota, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan masyarakat
- d) Media massa yang sangat berkembang baik milik pemerintah maupun swasta;
- e) Peran strategis KI (Komisi Informasi) dalam mengawal reformasi birokrasi agar pelayanan publik menjadi lebih baik;
- f) Edukasi INSAN (Internet Sehat dan Aman) yang CAKAP (Cerdas, Kreatif dan Produktif);
- g) Akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan Negara

### **4. Ancaman dan Tantangan**

- a) Persaingan global
- b) Belum optimalnya penyelenggaraan e-government;
- c) Adanya kesenjangan digital (tidak meratanya) sarana komunikasi dan informatika di daerah perdesaan dan perbatasan
- d) Kurangnya Komitmen Pimpinan OPD Prov. Riau, OPD Kab/Kota terhadap Integrasi Data/Pertukaran Data serta Keterisian Data;

- e) *Content* digital yang kurang mendidik, sesat dan/atau merusak moral & tatanan sosial masyarakat
- f) Rendahnya pengetahuan masyarakat akan hak dan kewajiban tentang penyiaran dan keterbukaan informasi;
- g) Tingginya sengketa informasi publik yang terjadi.
- h) Ketidaksiapan badan publik dalam menghadapi permintaan informasi;
- i) Terjadinya perubahan regulasi tentang perangkat lunak dan perangkat keras terhadap platform produk TI.
- j) Keterbatasan anggaran

**Tabel 3.1. ANALISIS SWOT DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU**

<p style="text-align: center;"><b>KONDISI INTERNAL</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>KEKUATAN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>KELEMAHAN</b></p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Komitmen Pimpinan yang tinggi;</li> <li>2. Tersedianya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi Pelaksanan Teknis pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau</li> <li>3. Adanya Regulasi Pendukung :               <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Undang -undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi,</li> <li>➤ Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers</li> <li>➤ Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran</li> <li>➤ Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.</li> <li>➤ Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>➤ Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.</li> <li>➤ Undang -undang Nomor 38 tahun 2009 tentang Pos.</li> <li>➤ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa</li> <li>➤ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.</li> <li>➤ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi ;</li> <li>2. Kurang optimalnya layanan informasi publik (personal, sarana dan konten</li> <li>3. Kurang maksimalnya keamanan jaringan (network security), pemanfaatan aplikasi yang telah dibangun, Akses jaringan internet hingga ke perdesaan dan ketersediaan Standar Teknis Penerapan Aplikasi di setiap OPD;</li> <li>4. Kurang maksimalnya ketersediaan data umum, data pembangunan dan data spasial.</li> <li>5. Rendahnya Kesadaran Badan Publik dalam pembentukan PPID;</li> <li>6. Rendahnya pengetahuan publik tentang Keberadaan Komisi Informasi</li> <li>7. Rendahnya pengawasan bidang pos, telekomunikasi dan informatika</li> <li>8. Kurangnya jumlah aparatur bidang komunikasi dan informatika</li> </ol>

<p><b>KONDISI EKSTERNAL</b></p>	<p>Pemerintahan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>➤ Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang – undang nomor 38 tahun 2009 tentang Pos;</li> <li>➤ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 28 tahun 2006 tentang Domain go.id</li> <li>➤ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 23 tahun 2009 tentang Pelaksanaan urusan pemerintah sub bidang Pos dan Telekomunikasi</li> <li>➤ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah</li> <li>➤ Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi</li> </ul> <p>4. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Server Data, melalui VSAT dan modem GPRS</li> <li>➤ Infrastruktur jaringan Pemerintah Provinsi Riau (Jaringan Fiber Optik /kabel bawah tanah, Jaringan wireless, dan Jaringan PNS Box)</li> <li>➤ layanan internet 500 Mbps</li> <li>➤ Akses komunikasi telpon bebas biaya (IP-Phone).</li> <li>➤ Peralatan Multimedia</li> <li>➤ Ruang multimedia</li> <li>➤ Media Center</li> <li>➤ Newsroom Pemerintah Provinsi Riau</li> </ul>	
---------------------------------	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ mobil unit untuk diseminasi informasi</li> <li>➤ Digital signage (anjungan informasi)</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Adanya Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri di luar pemerintah yang berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik (KIP)</li> <li>6. Tersedianya aparatur pengelola multimedia, TIK, analisis data, jurnalistik dan PPNS bidang Komunikasi dan Informatika</li> <li>7. Tersedianya Sumber Data yang otentik dan valid pada OPD Provinsi dan OPD Kab/Kota;</li> <li>8. Tersedianya website <a href="http://www.riau.go.id">www.riau.go.id</a> (portal), <a href="http://mediacenter.riau.go.id">http://mediacenter.riau.go.id</a>, dan <a href="http://diskominfo.riau.go.id">http://diskominfo.riau.go.id</a>, <a href="http://.komisiinformasi.riau.go.id">http://.komisiinformasi.riau.go.id</a></li> <li>9. Tersedianya aplikasi e-Mail Pemerintah Provinsi Riau, aplikasi perkantoran (e-office), aplikasi <a href="http://drive.riau.go.id">drive.riau.go.id</a> (aplikasi penyimpanan data-data), SDDKD/SDDKN (Sistem Database Dukungan Kebijakan Daerah/Nasional)</li> <li>10. Adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kominfotik Provinsi Riau ;</li> <li>11. Adanya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai media komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam penyebarluasan informasi publik</li> </ol>	
<p><b>PELUANG</b></p>	<p><b>STRATEGI MEMAKAI KEKUATAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG:</b></p>	<p><b>STRATEGI MENANGGULANGI KELEMAHAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG:</b></p>

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemajuan teknologi informasi;</li> <li>2. Keinginan masyarakat memperoleh data dan informasi;</li> <li>3. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat (khususnya Kementerian Dalam Negeri RI, Kemkominfo RI dan Kemensesneg RI)</li> <li>4. Adanya partisipasi dan Kemitraan Komunikasi Sosial antar Provinsi, Kab/Kota, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan masyarakat</li> <li>5. Media massa yang sangat berkembang baik milik pemerintah maupun swasta;</li> <li>6. Peran strategis KI (Komisi Informasi) dalam mengawal reformasi birokrasi agar pelayanan publik menjadi lebih baik;</li> <li>7. Edukasi INSAN (Internet Sehat dan Aman) yang CAKAP (Cerdas, Kreatif dan Produktif);</li> <li>8. Akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan Negara</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pelayanan pemerintah, masyarakat dan duniausaha melalui TI; (2 -7)</li> <li>2. Pemanfaatan Infrastruktur jaringan dalam meningkatkan kuantitas pelayanan informasi (2 – 4)</li> <li>3. Pemanfaatan sarana dan prasarana untuk penyebarluasan data informasi kepada masyarakat. (2,3 – 4)</li> <li>4. Melibatkan peran swasta dan lembaga perguruan tinggi untuk mendukung layanan berbasis TI melalui kemitraan yang strategis; (4)</li> <li>5. Pemanfaatan sarana dan prasarana untuk edukasi INSAN (Internet Sehat dan Aman) yang CAKAP (Cerdas, Kreatif dan Produktif) bagi masyarakat (8 – 4)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memanfaatkan teknologi informasi untuk menyederhanakan prosedur birokrasi serta transparansi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan publik. (1 – 3)</li> <li>2. Pembangunan dan Penguatan Infrastruktur jaringan dan Portal Informasi guna penyeimbang dalam kemajuan teknologi (1 -4)</li> <li>3. Pengembangan Data Center yang terintegrasi dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh OPD; (1 – 4)</li> <li>4. Mendorong pembentukan PPID pada masing-masing Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi publik yang baik; (2 – 6)</li> <li>5. Membangun kemitraan dengan Pusat maupun Kab/Kota dalam penerapan Sosialisasi peraturan perundang – undangan kepada masyarakat tentang komunikasi dan informatika (4-3)</li> <li>6. Melibatkan peran swasta / dunia usaha, berpartisipasi meningkatkan ketersediaan infrastruktur TI hingga pedesaan (4 – 4)</li> <li>7. Meningkatkan peran pemerintah, lembaga pendidikan dan dunia usaha dalam penciptaan SDM yang berkualitas; (4 – 9)</li> <li>8. Meningkatkan peran dan kontribusi media cetak dan media siaran baik milik pemerintah maupun swasta untuk membantu desiminasi informasi pembangunan yang telah dilakukan pemerintah daerah. (6 -3)</li> <li>9. Memanfaatkan media informasi elektronik, non elektronik, dalam dan luar ruangan secara efektif dalam menyampaikan informasi publik; (6 -3)</li> </ol>
---	---	--

		<p>10. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang INSAN dan CAKAP (8 -3)</p> <p>11. Pengembangan Data Center yang terintegrasi dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh OPD; (10,4)</p>
<p><b>ANCAMAN/TANTANGAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persaingan global</li> <li>2. OPD yang menangani komunikasi dan informatika di tingkat Kabupaten/Kota tidak mempunyai nomenklatur yang sama.</li> <li>3. Belum optimalnya penyelenggaraan e-government;</li> <li>4. Adanya kesenjangan digital (tidak meratanya) sarana komunikasi dan informatika di daerah perdesaan dan perbatasan</li> <li>5. Kurangnya Komitmen Pimpinan OPD Prov. Riau, OPD Kab/Kota terhadap Integrasi Data/Pertukaran Data serta Keterisian Data;</li> <li>6. <i>Content</i> digital yang kurang mendidik, sesat dan/atau merusak moral &amp; tatanan sosial masyarakat</li> <li>7. Rendahnya pengetahuan masyarakat akan hak dan kewajiban tentang penyiaran dan keterbukaan informasi;</li> </ol>	<p><b>STRATEGI MEMAKAI KEKUATAN UNTUK MENGATASI ANCAMAN/TANTANGAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan edukasi kepada aparaturnya dan masyarakat tentang komunikasi dan informatika (1 – 6,11)</li> <li>2. Memanfaatkan sistem informasi untuk pimpinan/eksekutif dalam pengambilan keputusan/kebijakan. (3 – 2,9)</li> <li>3. Melakukan koordinasi dengan komisi penyiaran untuk melakukan strategi dalam mengatasi siaran negara luar yang masuk di daerah perbatasan (4, 2)</li> <li>4. Melakukan Koordinasi dengan OPD terkait se- Provinsi Riau; (5 – 7)</li> <li>5. Melakukan Pengawasan dan pengendalian melalui Provider, warnet, instansi terkait terhadap content situs-situs yang tidak mendidik, Sesat dan/ atau merusak moral &amp; tatanan sosial masyarakat (6 – 6)</li> <li>6. Meningkatkan pemahaman tentang manfaat regulasi UU Penyiaran dan UU KIP; (7 – 2)</li> <li>7. Mendorong peran dan fungsi komisi informasi Provinsi Riau untuk menyelesaikan sengketa informasi. (8 – 5)</li> <li>8. Melakukan Identifikasi Badan Publik yang rawan atau mempunyai potensi untuk menjadi sasaran permintaan informasi publik; (9 – 5)</li> </ol>	<p><b>STRATEGI MEMPERKECIL KELEMAHAN DAN MENGATASI ANCAMAN/TANTANGAN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengedukasi masyarakat agar dapat memanfaatkan TI semaksimal mungkin dalam rangka menghadapi pasar global (1 – 3)</li> <li>2. Peningkatan keamanan teknologi informasi yang modern, <i>manageable</i>, dan handal; (1 – 4)</li> <li>3. Menyusun kebijakan/aturan dan standarisasi tata kelola pengembangan bidang komunikasi dan informatika Provinsi Riau (3 – 1,2)</li> <li>4. Menyusun SOP Komunikasi dan Informatika (3 – 1)</li> <li>5. Pembangunan Infrastruktur hingga ke pedesaan (4 -4)</li> <li>6. Membangun kemitraan dengan Badan Publik terutama yang mempunyai potensi besar untuk disengketakan dan dengan pemohon informasi yang aktif melakukan permintaan informasi kepada Badan Publik; (9 – 3)</li> <li>7. Melakukan sosialisasi, dialog interaktif, Focus Group Discussion (FGD), bimtek dsbnya dalam mencerdaskan dan memberikan pemahaman pada masyarakat dan aparat tentang komunikasi dan informatika</li> <li>8. Memberikan pelayanan informasi publik dengan membuat Desk Informasi (Meja Informasi) serta membangun dan mengembangkan sistem layanan informasi publik secara online;</li> </ol>

<p>8. Tingginya sengketa informasi publik yang terjadi.</p> <p>9. Ketidaksiapan badan publik dalam menghadapi permintaan informasi;</p> <p>10. Terjadinya perubahan regulasi tentang perangkat lunak dan perangkat keras terhadap platform produk TI.</p> <p>11. Keterbatasan anggaran</p>	<p>9. Melakukan pengawasan yang bersinambungan terhadap perusahaan yang belum memiliki izin maupun yang telah memiliki izin penyelenggara Pos dan Telekomunikasi. (11 – 1)</p> <p>10. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pembahasan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan teknologi yang digunakan (12 – 1)</p>	<p>9. Memberikan pemahaman terhadap badan publik tentang pentingnya keterbukaan informasi secara berkesinambungan (9 – 7)</p> <p>10. Sosialisasi UU KIP kepada masyarakat selaku pemohon informasi dan pengguna informasi; (8 – 7)</p>
--	---	--

Tabel 3.2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau.

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Di Luar Kewenangan OPD)	
1	2	3	4	5	6
Pelayanan Dinas Kominfo Provinsi Riau Bidang Tik Dalam Pelayanan Publik	Masih Lemahnya Kebijakan, Infrastruktur, Aplikasi Dan Perencanaan Bidang Tik	Nilai E-Government Provinsi Riau	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen Pimpinan yang tinggi terhadap pembangunan Komunikasi dan informatika;</li> <li>2. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.</li> <li>3. Regulasi Pendukung bidang komunikasi dan informatika</li> <li>4. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung :</li> <li>5. Server Data, melalui VSAT dan modem GPRS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemajuan teknologi informasi</li> <li>2. Dukungan Pusat (khususnya Kementerian Dalam Negeri RI, Kemkominfo RI dan Kemensesneg RI)</li> <li>3. Keinginan masyarakat memperoleh data dan informasi;</li> <li>4. Akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan Negara</li> <li>5. Persaingan global</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya infrastruktur bidang komunikasi dan informatika hingga ke perdesaan</li> <li>2. Masih terbatasnya aparatur yang handal dan profesional</li> <li>3. Lemahnya koordinasi dengan instansi terkait dalam pengembangan telekomunikasi</li> <li>4. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga berakibat belum optimalnya tata kelola pemerintahan</li> </ol>

1	2	3	4	5	6
			<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Infrastruktur jaringan Pemerintah Provinsi Riau (Jaringan Fiber Optik /kabel bawah tanah, Jaringan wireless, dan Jaringan PNS Box)</li> <li>➤ layanan internet 500Mbps</li> <li>➤ akses komunikasi telpon bebas biaya (IP-Phone).</li> </ul> <p>5. Tersedianya aparatur pengelola multimedia dan TIK</p> <p>6. Tersedianya aplikasi e-Mail Pemerintah Provinsi Riau, aplikasi perkantoran (e-office), aplikasi drive.riau.go.id (aplikasi penyimpanan data-data), SDDKD/SDDKN (Sistem Database Dukungan Kebijakan Daerah/Nasional</p>		<p>5. Kurang maksimalnya keamanan jaringan (network security), pemanfaatan aplikasi yang telah dibangun, dan ketersediaan Standar Teknis Penerapan Aplikasi di setiap OPD;</p> <p>6. Belum optimalnya penyelenggaraan e-government</p> <p>7. Adanya kesenjangan digital (tidak meratanya) sarana komunikasi dan informatika di daerah perdesaan dan perbatasan.</p> <p>8. Keterbatasan anggaran</p>

1	2	3	4	5	6
<p>Pelayanan Dinas Kominfo Provinsi Riau Dalam Memberikan Akses Informasi Publik Kepada Masyarakat</p>	<p>Masih Lemahnya Kelengkapan Regulasi, Sarana Prasarana Dan Proses Pelayanan Informasi Publik</p>	<p>Nilai Keterbukaan Informasi Provinsi Riau</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Peralatan Multimedia</li> <li>➤ Ruang multimedia</li> <li>➤ Media Center</li> <li>➤ Newsroom Pemerintah Provinsi Riau</li> <li>➤ mobil unit untuk diseminasi informasi</li> <li>➤ Digital signage (anjungan informasi)</li> </ul> </li> <li>2. Adanya Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri di luar pemerintah yang berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik</li> <li>3. Tersedianya aparatur analis data, jurnalistik dan PPNS bidang Komunikasi dan Informatika</li> <li>4. Persaingan global</li> <li>5. Tersedianya Sumber Data yang otentik dan valid pada OPD Provinsi dan OPD Kab/Kota;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keinginan masyarakat memperoleh informasi;</li> <li>2. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat (khususnya Kementerian Dalam Negeri RI, Kemkominfo RI dan Kemensesneg RI)</li> <li>3. Media massa yang sangat berkembang baik milik pemerintah maupun swasta;</li> <li>4. Peran strategis KI (Komisi Informasi) dalam mengawal reformasi birokrasi agar pelayanan publik menjadi lebih baik;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya Komitmen Pimpinan OPD Prov. Riau, OPD Kab/Kota terhadap Integrasi Data/Pertukaran Data serta Keterisian Data;</li> <li>2. Rendahnya pengetahuan masyarakat akan hak dan kewajiban tentang penyiaran dan keterbukaan informasi;</li> <li>3. Tingginya sengketa informasi publik yang terjadi.</li> <li>4. Ketidaksiapan badan publik dalam menghadapi permintaan informasi;</li> <li>5. Terjadinya perubahan regulasi tentang perangkat lunak dan perangkat keras terhadap platform produk TI.</li> </ol>

1	2	3	4	5	6
			<p>6. Tersedianya website <a href="http://www.riau.go.id">www.riau.go.id</a> (portal), <a href="http://www.mediacenter.riau.go.id">www.mediacenter.riau.go.id</a>, dan <a href="http://www.diskominfo.riau.go.id">www.diskominfo.riau.go.id</a>, <a href="http://komisiinformasi.riau.go.id">http://komisiinformasi.riau.go.id</a></p> <p>7. Adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kominfotik Provinsi Riau;</p> <p>8. Adanya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai media komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam penyebarluasan informasi publik</p>	<p>5. Edukasi INSAN (Internet Sehat dan Aman) yang CAKAP (Cerdas, Kreatif dan Produktif); (MC)</p> <p>6. Akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan Negara</p>	<p>7. Sebagian besar website yang terdapat pada OPD belum memuat data perkembangan kinerja OPD sesuai dengan tupkksi OPD tersebut, sehingga data terkait perkembangan kinerja pembangunan daerah sulit didapatkan dan berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan bagi stakeholder</p> <p>8. Belum berjalannya dengan baik penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah , sehingga menyebabkan nilai keterbukaan informasi belum mencapai nilai yang ditargetkan.</p> <p>9. Keterbatasan anggaran</p>

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Di Luar Kewenangan OPD)	
1	2	3	4	5	6
Pelayanan Dinas Kominfo Provinsi Riau Bidang Persandian	.....		Sarana dan prasarana sandi Sumber daya persandian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi</li> <li>- Gangguan berupa interupsi (menghalangi penyampaian pesan dari sumber informasi untuk sampai kepada tujuannya)</li> <li>- Gangguan intersepsi (menyadap pesan yang sedang mengalami proses distribusi dari sumber informasi keapda tujuannya)</li> <li>- Gangguan modifikasi (merubah informasi yang besar dari sumber informasi sehingga akan berbeda diterima di tujuannya)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) sandi berkualifkasi ahli sandi akibat regenerasi SDM Sandi kurang berjalan dengan baik dan minat menjadi SDM sandi yang kurang.</li> <li>- Terbatasnya kemampuan pemda dalam menetapkan informasi berklasifikasi (pembuatan, pengiriman, penyimpanan informasi berklasifikasi di luar fungsi sandi belum teramankan)</li> <li>- Belum semua komponen eselon I memanfaatkan fungsi sandi telekomunikasi (santel) untuk mengrimkan informasi yang harus</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gangguan fabrikasi(penciptaan informasi baru yang tidak pernah dihasilkan sumber inforamsi untuk diterima di tujuannya).</li> <li>- Payung hukum tata kelola persandian.</li> </ul>	<p>diamankan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum dioptimalkan fitur kriptograf pada palsan kriptosoft untuk menyimpan dan pemusnahan data</li> <li>- Belum membuat kenjiakan menjalankan prosedur back-up dengan aman.</li> <li>- Belum mempunya pemerintah daerah dalam menetapkan kategori informasi yang dimilikinya apakah termasuk dalam katergori informasi dikecualikan.</li> </ul>
--	--	--	--	--	---

### 3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Tabel 3.3. Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Terhadap Pencapaian Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Visi : <i>“Terwujudnya Provinsi Riau Yang Maju, Masyarakat Sejahtera, Berbudaya Melayu dan Berdaya Saing Tinggi, Menurunnya Kemiskinan, Tersedianya Lapangan Kerja Serta Pematapan Aparatur”</i>				
No.	Misi Dan Program KDK Dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<p>Misi 5 :</p> <p>Mewujudkan Pemerintahan Yang Handal dan Terpercaya serta Pematapan Kehidupan Politik</p> <p>A. Meningkatkan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan</p>		Kurangnya Pemahaman Badan Publik Terhadap UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	
	Program Informasi dan Komunikasi Publik		Keterbatasan SDM Yang Handal Dan Profesional	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

No.	Misi Dan Program KDK Dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Program Pengembangan Data Dan Informasi/ Statistik Daerah	Database Masih Kurang Lengkap Dan Bersifat Parsial		Keinginan Masyarakat Memperoleh Informasi
	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	Belum Optimalnya Partisipasi Dan Kemitraan Dengan Lembaga Komunikasi Dalam Penyebarluasan Informasi		
	Program Pengembangan Aplikasi Informatika	Data center yang masih minim dan belum terintegrasi  Belum terintegrasinya sistem informasi di lingkungan pemerintah Provinsi Riau		

No.	Misi Dan Program KDK Dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika	Terbatasnya ketersediaan infrastruktur komunikasi dan informatika		
	Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika			
	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media massa			
	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Terbatasnya kemampuan teknis aparatur	Terbatasnya anggaran	Tersedianya sarana peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program cyber Provinsi Riau
	Program Peningkatan sarana prasarana aparatur	Terbatasnya sarana dan prasarana	Terbatasnya anggaran	

No.	Misi Dan Program KDK Dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Program Peningkatan Ketatalaksanaan			
	Program Peningkatan sistem monitoring dan evaluasi			
	Program Kerjasama antar Lembaga			
	Program Penataan Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan			

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Rencana Strategis Sesuai Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 – 2019 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2015 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan agenda (nawacita) Presiden/Wakil Presiden Joko Widodo dan M. Jusuf Kalla.

Pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika lima tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energy, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sector pariwisata dan industry, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai leading sector di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Renstra Tahun 2015-2019 akan berfokus membangun sector telekomunikasi, tata kelola internet, dan digitalisasi siaran televisi.

#### **VISI :**

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Tahun 2015 – 2019 mengacu kepada Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015 – 2019 yaitu *“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”*.

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI diharapkan memberikan kontribusi melalui upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK.

**MISI :**

Untuk mewujudkan Visi tersebut melalui 7 misi pembangunan nasional, yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; dan
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritime yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

**TUJUAN :**

Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi focus pembangunan bidang komunikasi dan informatika di mana Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung program unggulan pemerintah Indonesia yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energy, kemaritiman, pariwisata dan industri, infrastruktur, pengembangan SDM, dan perbatasan, dan Kementerian Kominfo sebagai leading sektor.

Tujuan Kementerian Kominfo antara lain :

1. Mengelola sumber daya spectrum frekuensi radio secara optimal
2. Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman
3. Meningkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi
5. Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing
6. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan public

7. Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian focus pembangunan pemerintah Indonesia.

**SASARAN :**

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung focus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan.
2. Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, social, budaya, pertahanan dan keamanan.
3. Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing dan aman.
4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien.

**3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Hidup Strategis.**

Organisasi Perangkat Daerah penanggung jawab bidang Komunikasi dan Informatika sejak Tahun 2017 sudah hampir semua Kabupaten/Kota memiliki nomenklatur sendiri, kecuali Kabupaten Kepulauan Meran, Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai yang merupakan bagian dari Sekretariat Daerah.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota saat ini dalam proses penyusunan, karena OPD baru dilaksanakan Tahun 2017. Namun demikian, berdasarkan telaahan Renstra pada Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Indragiri Hilir periode yang lalu, Permasalahan yang ditemui adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
2. Belum berkembangnya integrasi jaringan seluruh SKPD yang didukung dengan implementasi teknologi informasi dan komunikasi.

3. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan database sehingga implementasi e-Government belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan data akurat, cepat, dan tepat.
4. Belum optimalnya regulasi yang dimiliki Pemerintah Daerah

Visi yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hilir adalah **Terwujudnya penyelenggaraan transportasi serta komunikasi dan informatika yang tertib, aman, nyaman, lancar, dan terjangkau tahun 2019.**

Sedangkan Misinya adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan, penyelenggaraan sarana dan prasarana transportasi, komunikasi dan informatika.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur perhubungan, komunikasi dan informatika.
3. Meningkatkan penyelenggaraan pengawasan, pengendalian, pemeliharaan sarana prasarana transportasi, komunikasi dan informatika.
4. Meningkatkan fungsi perencanaan dan evaluasi internal
5. Melakukan pengendalian dan pengawasan ketersediaan sarana transportasi, komunikasi dan informatika yang terjangkau.

### **3.5. Penentuan Isu-isu strategis**

Isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam kurun waktu 2014-2019 antara lain:

- a. Penguatan Data Center di Provinsi Riau
- b. Penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
- c. One Map One Data
- d. Penerapan e-government di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
- e. Peningkatan layanan publik berbasis teknologi informasi dalam upaya keterbukaan informasi publik.
- f. Peningkatan keamanan sistem informasi bidang sandi
- g. Implementasi Cyber City di Provinsi Riau
- h. Penguatan regulasi bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

- i. Meningkatnya ancaman terhadap keamanan informasi melalui jaringan internet dan cyber crime
- j. Meningkatnya resiko penyalahgunaan keamanan informasi teknologi baik jaringan maupun aplikasi yang digunakan
- k. Kurangnya kesadaran pengamanan informasi yang mengakibatkan kebocoran informasi
- l. Keterbatasan SDM sandi yang berkualifikasi ahli sandi
- m. Keterbatasan kemampuan dalam pengelolaan informasi berklasifikasi
- n. Belum terjangkaunya jaringan infrastruktur hingga ke pedesaan
- o. implementasi reformasi birokrasi di jajaran aparaturnya Pemprov Riau

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU**

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa mendatang. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dalam kerangka rencana strategis, tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan, dalam rangka merealisasikan misi.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Sasaran juga menggambarkan tentang hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik, dan terukur. Oleh karena itu dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, tujuan yang telah dirumuskan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah :

***“Terselenggaranya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi”***

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau maka sasaran yang ingin dicapai dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut :

**Tabel 4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH**  
**PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2015	2016	2017	2018	2019
1.	Terselenggaranya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Indikator 1. Nilai e-government Provinsi Riau	2,3	2,45	2,6	2,65	2,75
		2. Meningkatnya kualitas pelayanan internal OPD	Indikator 2 : Nilai Keterbukaan Informasi Provinsi Riau	35,82	39,36	42,91	44,5	46,45

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan telaahan permasalahan isu-isu strategis serta analisis SWOT Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau (Diskominfotik), maka rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Diskominfotik Provinsi Riau dalam menunjang pencapaian yang akan dilakukan dalam periode 2014-2019 dapat dilihat pada berikut :

VISI	:	<i>“Terwujudnya Layanan Komunikasi dan Informatika yang handal dan berdaya saing “</i>		
MISI	:	Mewujudkan manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), efektif dan efisien, professional, transparan dan akuntabel.		
NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1.	Terselenggaranya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Menyusun Rencana Induk e-government (Master Plan e-Gov) yang memuat arsitektur proses bisnis, arsitektur informasi, arsitektur aplikasi dan arsitektur infrastruktur TI dan Rencana Implementasinya	Menyusun aturan (Pergub) agar master plan e-gov menjadi acuan seluruh OPD untuk membangun TI agar terintegrasi dan memudahkan pengelolaannya

			Mengawal implementasi master plan agar sesuai dengan arsitektur dan jadwal yang sudah direncanakan	Menyusun Tim manajemen proyek / kegiatan TI yang terpadu dan terpusat dan membuat aturan bahwa setiap pengembangan TI harus berkoordinasi dengan Dinas Kominfotik
NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			Menyusun kebijakan dan menyediakan sumber daya manusia yang cukup untuk mengoperasikan system-sistem informasi yang sudah diimplementasikan	Penyusunan kebijakan/aturan tata kelola TI, uraian jabatan dan tugas organisasi pengelola TI dan pemenuhan kebutuhan SDM untuk mengelola layanan TI dengan baik
			Menyiapkan aplikasi yang terintegrasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Membangun aplikasi yang dapat mengintegrasikan aplikasi-aplikasi di seluruh OPD
			Mengaplikasikan “paperless office system” dalam upaya efisiensi dan efektivitas kinerja aparatur	Membuat SE Gubernur Riau dan memberikan pelatihan kepada seluruh OPD untuk penggunaan e-office di setiap OPD
			Mengoptimalkan pengelolaan website pemprov dan OPD	Menyajikan data/informasi yang bermanfaat melalui website Pemprov Riau dan OPD
			Menyediakan sarana dan prasarana teknologi informasi bagi masyarakat	Penyediaan sarana dan prasarana TIK bagi masyarakat

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			Melakukan kerjasama dengan media massa	Peningkatan peran media massa dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat
			Memberikan pelatihan pada aparatur dan masyarakat secara berkala untuk meningkatkan pengetahuan di bidang komunikasi dan informatika	Peningkatan kualitas SDM aparatur dan masyarakat melalui pelatihan bidang komunikasi dan informatika
			Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM	Kerjasama dengan PT dan Lembaga Pelatihan TIK
		Meningkatnya kualitas pelayanan internal OPD	Mengoptimalkan kinerja pengelolaan kerumahtanggaan dan ketatausahaan	Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai
				Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal
				Peningkatan kemampuan SDM melalui keikutsertaan pelatihan/bimtek

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dalam rangka mendukung visi dan misi Gubernur Riau periode 2014 – 2019 terdiri dari :

#### **A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

1. Penyediaan jasa surat menyurat;
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
5. Penyediaan alat tulis kantor;
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
7. Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor;
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan;
9. Penyediaan makan dan minuman;
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
11. Penyediaan jasa administrasi kantor;
12. Inventarisasi Aset Milik Pemerintah Provinsi Riau.

#### **B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor;
3. Pengamanan jaringan komunikasi pemerintah daerah;
4. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
5. Penyediaan Sarana Kearsipan.

#### **C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
2. Pengadaan pakaian Korpri;
3. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu;
4. Pengadaan pakaian olahraga dan perlengkapannya;

5. Pengadaan pakaian melayu dan perlengkapannya;
6. Pembinaan Fisik Mental dan Aparatur.

**D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

1. Pendidikan Dan Pelatihan Formal;
2. Pembinaan fisik dan mental aparaturnya;
3. Peningkatan jiwa nasionalisme dan kebangsaan aparaturnya pemerintah Provinsi Riau;
4. Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan.

**E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja Keuangan**

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD;
2. Penyusunan laporan keuangan semesteran;
3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
4. Penyusunan rencana strategis (RENSTRA) SKPD
5. Penyusunan rencana kerja OPD;
6. Rapat koordinasi pada setiap OPD;
7. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
8. Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyampaian OPD dan PPKD.

**F. Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi**

1. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi;
2. Pembinaan kelompok informasi masyarakat;
3. Pemantapan pemahaman aparaturnya tentang keterbukaan;
4. Pembinaan media center daerah;
5. Workshop jurnalistik media siaran (broadcasting Jurnalistik);
6. Pembelajaran teknologi informasi bagi masyarakat.
7. Pengelolaan Sumber Daya Persandian di Pemerintah Daerah;
8. Pelaksanaan Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan atas Penyelenggaraan Pengamanan Informasi;
9. Penyelenggaraan Kontra Penginderaan Untuk Pengamanan Informasi Pimpinan di Pemerintah Daerah.

**G. Program kerjasama informasi dan media massa**

1. Pengembangan kemitraan lembaga komunikasi;

2. Dialog interaktif melalui media televisi lokal.

**H. Program peningkatan Ketatalaksanaan**

1. Peningkatan Operasional KPID.

**I. Program Peningkatan Sistem Monitoring dan Evaluasi**

1. Pengawasan dan Perizinan TV dan Radio;
2. Pengawasan Langsung Siaran TV kabel di 12 kab/kota.

**J. Program Kerjasama Antar Lembaga**

1. Diskusi Ahli.

**K. Program Penataan Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan**

1. Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Masyarakat cinta siaran indonesia (KCSI).

**L. Program pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika**

1. Pengembangan sarana dan prasarana perangkat jaringan Pemerintah Provinsi Riau;
2. Pengeloaan bandwidth internet dan teknologi VPN Pemerintah Provinsi Riau;
3. Pembangunan data center Provinsi Riau;
4. Pengembangan dan Pengelolaan Comman Center Provinsi Riau.

**M. Program pengembangan aplikasi informatika**

1. Pengembangan e-Government Provinsi Riau;
2. Pembinaan, evaluasi dan pengendalian e-Government di OPD Pemerintah Provinsi Riau;
3. Bimbingan teknis bagi administrator pengelola e-Government pemerintah Provinsi Riau.

**N. Program pengembangan informasi dan komunikasi publik**

1. Pengelolaan website riau.go.id;
2. Pengelolaan dan pengembangan website dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Riau;
3. Layanan PPID Provinsi Riau dan Diskominfoitik Provinsi Riau;
4. Layanan informasi melalui media center;
5. Newsroom pemerintah Provinsi Riau;
6. Pameran pembangunan TIK Provinsi Riau;
7. Peliputan acara dan dokumentasi kegiatan Pemerintah Provinsi Riau;
8. Layanan kinerja komisi informasi Provinsi Riau;
9. Penyelesaian sengketa informasi melalui ajudikasi/mediasi di luar Pekanbaru;

10. Layanan informasi publik melalui media cetak, media elektronik dan media luar ruangan;
11. Penguatan kelembagaan KIP serta kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah;
12. Pengembangan TV dan radio streaming pemerintah Provinsi Riau;
13. Menyediakan layanan taman pintar;
14. Identifikasi, sinkronisasi dan integrasi data dan informasi pembangunan Pemerintah Daerah se-Provinsi Riau;
15. Update dan analisa data pembangunan Provinsi Riau;
16. Pembinaan PPID di Provinsi Riau;
17. Pembinaan Pemahaman Aparatur Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

**O. Program pengembangan data/informasi**

1. Penyusunan Data Statistik Provinsi Riau;
2. Forum Data Sektoral;
3. Layanan Informasi Melalui Media Center;
4. Newsroom Pemerintah Provinsi Riau;
5. Identifikasi, Sinkronisasi, Integrasi Data Sektoral Pemerintah Daerah se-Provinsi Riau;
6. Update dan Pengolahan Data Sektoral Pemerintah Daerah se-Provinsi Riau.

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Riau terdiri dari :

A. Tujuan (RPJMD) : Membuka isolasi Daerah Terisolir

Sasaran (RPJMD) : Meningkatnya kualitas akses masyarakat di pedesaan

Indikator Kinerja OPD :

1. Nilai e-government Provinsi Riau

Sub Indikator :

Jumlah jaringan komunikasi dan informatika yang terpasang

B. Tujuan (RPJMD) : Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah

Sasaran (RPJMD) : Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pemerintahan

Indikator Kinerja OPD :

1. Nilai e-government Provinsi Riau

Sub Indikator :

Jumlah OPD yang menerapkan e-government secara terintegrasi, aman dan handal

2. Nilai Keterbukaan Informasi Provinsi Riau

Sub Indikator :

a. Persentase keterisian data pembangunan Provinsi Riau pada SDDKD

b. Jumlah pengunjung website resmi dan media online yang dikelola Diskominfo Provinsi Riau

c. Jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan internet yang dikelola Diskominfo Provinsi Riau

**Tabel 6.1. INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
PROVINSI RIAU YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai e-government Provinsi Riau	2,13	2,3	2,45	2,6	2,65	2,75	2,75
2.	Nilai Keterbukaan Informasi Provinsi Riau	32,27	35,82	39,36	42,91	44,5	46,45	46,45

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah untuk *Penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi*.

Sebagai perangkat daerah yang mandiri, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019 yaitu "*Mewujudkan Pemerintahan yang Handal dan Terpercaya Serta Pemantapan Kehidupan Politik*" yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019.

Renstra ini juga menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau selama periode 2017-2019 merupakan periode yang mengacu pada sisa waktu periode RPJMD Provinsi Riau. Sebagaimana RPJMD Provinsi Riau untuk program/kegiatan tahun 2019 merupakan program/ kegiatan transisi sambil menunggu ditetapkannya RPJMD periode berikutnya.

Demikian penyusunan Renstra Dinas komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2014-2019 agar dapat dijadikan sebagai alat perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pertanggungjawaban dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.

Pekanbaru, Februari 2018

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
PROVINSI RIAU



**Ir. H. YOGI GETRI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650916 199303 1 002



